

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan di setiap negara khususnya negara berkembang lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan pembangunan di sektor ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan sektor lainnya. Keterbelakangan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang juga berada pada sektor ekonomi. Oleh sebab itu tidak mengherankan, bahkan dapat dikatakan merupakan tuntutan dan tujuan negara apabila pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus.

Pembangunan ekonomi berjalan melalui proses dan membutuhkan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Menurut Jhingan (1992:420), tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, pertambangan, perkebunan dan industri. Modal juga diperlukan untuk mendirikan sekolah, rumah sakit, jalan dan sebagainya. Hakekat pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal *overhead* sosial dan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk

menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2001;108).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Kewenangan tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama serta moneter dan fiskal. Kewenangan pembiayaannya, yaitu daerah dapat menggali sekaligus menikmati sumber-sumber potensi ekonomi, serta sumber daya alamnya tanpa ada intervensi terlalu jauh dari pemerintah pusat. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya tercipta peningkatan pembangunan daerah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Investasi akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menimbulkan *multiplier effect* terhadap sektor-sektor lainnya.

Pada hakekatnya pembangunan ekonomi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.

Proses pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi daerah. Kebutuhan ekonomi akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan *output agregat* (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto atau yang lebih dikenal dengan PDRB setiap tahun (Tambunan, 2001:20).

Pada dasarnya PDRB terbagi dalam 9 (Sembilan) sektor utama, yaitu (1) sektor pertanian; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas dan air minum; (5) sektor bangunan dan konstruksi; (6) sektor perdagangan; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) sektor jasa-jasa.

Ke-9 (Sembilan) sektor tersebut adalah seluruh sektor ekonomi yang merupakan gambaran perekonomian dari suatu daerah atau wilayah. Tinggi ataupun rendahnya perekonomian suatu daerah akan tergambar dari pertumbuhan PDRB daerah yang bersangkutan.

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 kabupaten/ kota yang ada di propinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta

memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di kota Medan.

Perkembangan PDRB kota Medan menurut sektor ekonomi selama tahun 2008 hingga tahun 2012 ditampilkan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1. PDRB Kota Medan Tahun 2008-2012 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	735,253.74	765,950.80	771,325.61	830,624.79	893,995.70
2. Pertambangan & Penggalian	567.16	569.77	553.49	596.04	641.52
3. Industri Pengolahan	4,514,289.28	4,591,595.91	4,792,159.14	5,160,578.28	5,554,294.58
4. Listrik, Gas & Air Bersih	442,537.31	464,916.70	497,661.59	535,921.60	576,808.70
5. Bangunan	3,463,836.71	3,748,682.48	4,005,474.15	4,313,413.28	4,642,496.78
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	8,134,822.15	8,824,157.84	9,584,505.26	10,321,357.91	11,108,805.88
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,287,379.45	6,866,783.50	7,346,132.59	7,910,900.11	8,514,446.88
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,586,682.59	4,720,839.82	5,133,721.48	5,528,399.78	5,950,178.32
9. Jasa-Jasa	3,208,583.61	3,446,554.21	3,690,691.41	3,974,430.18	4,277,651.62
PDRB	31,373,951.99	33,430,051.02	35,822,224.73	38,576,221.98	41,519,319.99

Sumber: BPS, PDRB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2009-2013

Tabel 1.1 menjelaskan sektor-sektor ekonomi dalam PDRB dari tahun 2008-2012, secara umum rata-rata per sektor relatif meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2012. PDRB atas dasar harga konstan 2000 kota Medan pada tahun 2012 sebesar Rp. 41.519.319,99 juta atau sekitar 30,12 persen kontribusi PDRB

kota Medan terhadap PDRB propinsi Sumatera Utara. Kontribusi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya.

Dari seluruh sektor ekonomi di kota Medan, tercatat di tahun 2012 sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor terbesar memberikan kontribusi terhadap PDRB dengan total sektor ini sebesar Rp. 11.108.805,88 juta atau sebesar 26,76 persen disusul oleh sektor pengangkutan dan komunikasi dan industri pengolahan masing-masing sebesar 20,51 persen dan 13,38 persen.

**Tabel 1.2. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kota Medan Tahun 2008-2012 (Persen)**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian	2.34	2.29	2.15	2.15	2.15
2. Pertambangan & Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Industri Pengolahan	14.39	13.73	13.38	13.38	13.38
4. Listrik, Gas & Air Bersih	1.41	1.39	1.39	1.39	1.39
5. Bangunan	11.04	11.21	11.18	11.18	11.18
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	25.93	26.40	26.76	26.76	26.76
7. Pengangkutan & Komunikasi	20.04	20.54	20.51	20.51	20.51
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	14.62	14.12	14.33	14.33	14.33
9. Jasa-Jasa	10.23	10.31	10.30	10.30	10.30
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS, PDRB Kab/Kota Sumatera Utara Tahun 2009-2013

Dari tabel 1.2 menjelaskan bahwa selama tahun 2008 hingga tahun 2012 kontribusi sektor perekonomian di kota Medan mengalami pergeseran meskipun

relatif tidak signifikan. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan dalam menyumbang total PDRB kota Medan atas dasar harga konstan 2000 adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang mengalami penurunan dalam menyumbang PDRB kota Medan atas dasar harga konstan 2000 adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Meskipun terjadi penurunan dalam menyumbang PDRB kota Medan, namun demikian masih perlu dilakukan penelitian apakah sektor-sektor tersebut merupakan sektor basis atau sektor unggulan di kota Medan. Demikian pula pergeseran sektor yang terjadi tidak dapat dipastikan dengan hanya melihat angka-angka yang tercatat dalam tabel 1.1 dan tabel 1.2. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini dilakukan untuk melihat pergeseran antar sektor ekonomi, menentukan sektor basis atau sektor unggulan dan klasifikasi sektor ekonomi di kota Medan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah kota Medan.
2. Bagaimana perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah kota Medan.
3. Bagaimana Kontribusi *Provincial Share*, *Proportional Shift* dan *Differential Shift* terhadap perekonomian wilayah kota Medan.

4. Bagaimana kausalitas antar sektor dalam perekonomian terhadap sektor basis dalam perekonomian di Kota Medan.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian wilayah kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan dan pergeseran sektor perekonomian wilayah kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kontribusi *Provincial Share*, *Proportional Shift* dan *Differential Shift* terhadap perekonomian wilayah kota Medan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kausalitas antar sektor dalam perekonomian terhadap sektor basis dalam perekonomian di Kota Medan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan ekonomi kota Medan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.